

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian

2.1.1. Pengertian Program

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

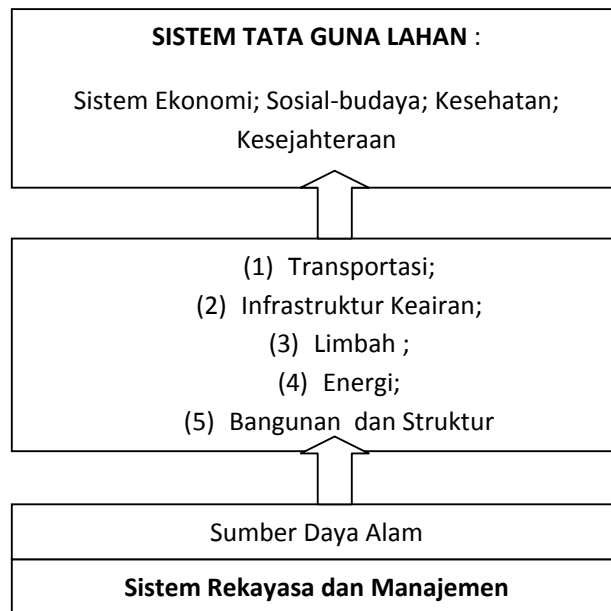
Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.1.2. Pengertian Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur

memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).



Gambar 2.1 Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, dan Kesejahteraan (Grigg dan Fontane, 2000)

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane (2000) seperti pada gambar 2.1 diatas. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur

keairan, limbah, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

2.1.3. Pengertian Perdesaan

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya menggunakan pendekatan administratif, pengertian dalam undang-undang tersebut merujuk pada definisi secara fungsional. Sehingga, dalam lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, dikenal istilah perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahannya menggunakan 'desa'.

Sedangkan menurut Suhardjo (2008) dalam beberapa dekade terakhir mulai terjadi perubahan-perubahan definisi kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan mulai berubahnya tipologi kawasan perdesaan dan perkembangan kawasan perdesaan dalam beberapa waktu terakhir. Terutama setelah era globalisasi yang masuk ke perdesaan, telah terjadi interaksi dan negosiasi sosial budaya masyarakat perdesaan terhadap modernitas dan budaya luar. Faham dikotomi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan mulai ditinggalkan dengan tidak relevannya pemahaman tersebut dengan mulai biasanya perdesaan-perkotaan

Dalam definisi klasik, secara ekonomi kawasan perdesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan perdagangan (Suhardjo, 2008). Definisi tersebut masih banyak digunakan hingga saat ini. Namun munculnya kawasan perdesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisi tersebut dirasa belum dapat mewakili keseluruhan tipologi kawasan perdesaan. Oleh karenanya muncul istilah-istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan perdesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi (Suhardjo, 2008)

Pendekatan klasik lainnya yang digunakan dalam mendefinisikan kawasan perdesaan adalah pendekatan berdasarkan paradigma modernisasi dan model dikotomi. Pendekatan

tersebut muncul setelah masa revolusi industri. Dengan munculnya kawasan-kawasan kota industri dengan segala modernitasnya, kawasan perdesaan dianggap sebagai representasi masyarakat tradisional (*gemeinschaft*) dan kawasan perkotaan dianggap sebagai representasi masyarakat modern (*gesellschaft*). Model dikotomik lainnya adalah solidaritas mekanik vs organik, serta kelompok primer vs kelompok sekunder (Suhardjo, 2008).

Lain halnya dengan paradigma lama, paradigma baru memandang kawasan perdesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian. Perubahan mendasar di wilayah perdesaan terjadi dalam semua bidang sebagai bentuk respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik (Illbery, 1998). Akibatnya, terutama di negara maju dan negara berkembang, telah terjadi perubahan dimana sektor non-pertanian tumbuh tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di kawasan perdesaan sehingga memunculkan desa-desa wisata, desa industri kerajinan, desa nelayan, dan sebagainya. Selain itu, proses diversifikasi perdesaan juga menunjukkan meningkatnya konsumsi di perdesaan sehingga kawasan perdesaan tidak lagi dapat dianggap sebagai kawasan produksi dan kawasan perkotaan dianggap sebagai konsentrasi konsumsi. (Suhardjo, 2008)

Dengan menggunakan pendekatan yang lebih umum, Suhardjo (2008) mendefinisikan kawasan perdesaan sebagai kesatuan wilayah sosial/budaya, atau kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menjelaskan kawasan perdesaan yang bias akibat mempunyai kemiripan dengan sifat kota, Suhardjo (2008) mendefinisikan kawasan tersebut sebagai kawasan desa-kota atau kawasan perdesaan yang mempunyai ciri kota, yang biasanya terdapat di kawasan *fringe area*. Sedangkan dalam Kamus Tata Ruang 2008, desa-kota didefinisikan sebagai desa yang mata pencahariannya mirip dengan di kota, termasuk gaya hidup dan gaya perumahannya. Menggunakan pendekatan batasan fungsional, kawasan tersebut dicirikan dengan kesamaan fisik (perumahan) dan sosial budaya (mata pencaharian dan gaya hidup).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kawasan definisi kawasan perdesaan yang akan diangkat dalam penelitian. Kawasan perdesaan dapat diartikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan batasan administratif dan batasan fungsional sebagai berikut:

1. Dalam batasan administratif, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan secara hukum.

2. Dalam pendekatan fungsional, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah fungsional yang memiliki ciri fisik dan sosial budaya tertentu dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dalam definisi ini, kawasan *sub-urban* atau *fringe area* dengan ciri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai kawasan perdesaan.

Maka berdasarkan pendekatan tersebut, Desa Wonokerto baik secara administratif maupun fungsional dapat dikategorikan sebagai kawasan perdesaan.

2.2. Kebijakan dan Program Nasional Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perdesaan nasional dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN 2010-2014 merupakan RPJMN tahap dua dari rangkaian RPJMN yang ditetapkan dalam RPJPN. RPJMN disusun dalam empat tahapan yaitu RPJMN I (2005-2009), RPJMN II (2010-2014), RPJMN III (2015-2019), serta RPJMN IV (2020-2024). Pentahapan tersebut sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden negara Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

RPJMN I dan RPJMN II ditetapkan dalam rangka melaksanakan misi pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dalam tahap ini pembangunan perdesaan meliputi:

1. Pengembangan agroindustri padat karya,
2. Peningkatan kapasitas SDM,
3. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di perdesaan dan kota-kota kecil,
4. Peningkatan akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi,
5. Pengembangan potensi sosial budaya lokal, serta
6. Intervensi harga dan kebijakan propertanian.

Sedangkan secara khusus, dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ditetapkan arah kebijakan pembangunan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Meningkatkan ketahanan desa, serta
3. Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan.

Adapun sasaran pembangunan perdesaan dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat,
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat,
3. Pengembangan ekonomi perdesaan,
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdesaan, serta
5. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Meskipun sasaran pembangunan perdesaan tersebut merupakan kegiatan yang multidimensi dan multi sektoral, pembangunan infrastruktur perdesaan dituntut untuk dapat memperhatikan aspek-aspek penting pembangunan perdesaan. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam suatu kawasan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur untuk kawasan desa dalam kategori berkembang yang berbasis pada partisipasi masyarakat. PIIP berada di bawah payung kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan komponen kegiatannya meliputi kegiatan fasilitasi dan mobilisasi masyarakat. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan

tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

PPIP yang dilatarbelakangi semangat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan ini merupakan program lanjutan dari program pembangunan infrastruktur perdesaan sebelumnya. Sebelum dimulainya program PPIP tahun 2007, Ditjen Ciptakarya memiliki program-program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam bentuk kegiatan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak di bidang infrastruktur perdesaan (PKPS-BBMIP) pada tahun 2005, *Rural Infrastructure Support Program* (RISP) pada tahun 2006. Namun berbeda dengan program sebelumnya, PPIP mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan programnya. Dan dalam pelaksanaannya, PPIP dilaksanakan oleh Satuan Kerja PIP Kabupaten yang berkoordinasi dengan Satker PIP Provinsi dan Tim Koordinasi serta Tim Pelaksana Kabupaten.

Sebagai program nasional, PPIP dilaksanakan di 29 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dengan sasaran lokasi yang terus bertambah setiap tahunnya. Adapun PPIP meliputi komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat,
2. Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui bantuan langsung masyarakat (BLM),
3. Peningkatan kapasitas pelaksanaan program serta pemantauan dan evaluasi,

Sedangkan pendekatan program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat, dimana seluruh proses kegiatan baik tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat,
2. Keberpihakan pada yang miskin, yaitu orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasilnya diupayakan dapat berdampak langsung pada penduduk miskin,
3. Otonomi dan desentralisasi, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur,

4. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses kegiatan dan memberikan kesempatan partisipasi aktif dari kelompok miskin, kaum perempuan, dan minoritas,
5. Keswadayaan,
6. Keterpaduan program pembangunan, yang berarti program dilaksanakan dengan terintegrasi dengan program pembangunan perdesaan lainnya,
7. Penguatan kapasitas kelembagaan, serta
8. Kesetaraan dan keadilan gender.

Dan sesuai dengan arahan pedoman pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan, program ini dilaksanakan dengan salah satunya adalah mengedepankan integrasi dengan program-program terkait. Sehingga meskipun dilaksanakan secara partisipatif, program ini juga harus memperhatikan kebijakan pembangunan kawasan. Seperti misalnya pada rencana tata ruang pengembangan kawasan perdesaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten maupun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.

2.3. Jenis-Jenis Infrastruktur

Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori (Grigg, 1988) sebagai berikut :

1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (*treatment plant*),
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang,
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,
5. Fasilitas lintas air dan navigasi,
6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,

7. Sistem transit publik,
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,
9. Fasilitas gas alam,
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,
11. Fasilitas perumahan publik,
12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
13. Fasilitas komunikasi.

Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7 kelompok besar (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan),
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan),
3. Komunikasi,
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa, dll),
5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat),
6. Bangunan, serta
7. Distribusi dan produksi energi.

2.4. Perkembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kemandirian pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi di kawasan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi kawasan perdesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kota, dan menguatkan peran desa sebagai pusat produksi dan kebutuhan sumberdaya pembangunan.

Membangun hubungan keterkaitan antar desa-kota juga merupakan salah satu cara yang ditempuh sebagai suatu upaya pembangunan wilayah perdesaan, dimana peran desa dikuatkan sebagai pusat produksi dan sumberdaya. Keterkaitan tersebut dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan, dan mengurangi angka urban masyarakat dari desa ke kota. Diharapkan pola tersebut mendorong perkembangan

ekonomi desa dan mendorong pemerataan ekonomi antara desa dan kota. Dalam hubungan yang lebih intensif, hubungan desa-kota tersebut dapat berupa interaksi spasial antar subsistem rantai agribisnis/agroindustri (Rustadi, 2007).

Dalam mengukur perkembangan ekonomi kawasan perdesaan, Adisasmita (2006) menawarkan beberapa pendekatan. Adapun beberapa pendekatan dalam mengukur perkembangan ekonomi kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa Per Kapita

Pendapatan desa perkapita digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk melihat proporsi pendapatan suatu desa terhadap jumlah penduduk desa. Pendapatan desa menggunakan prinsip pendapatan domestik bruto, dihitung dengan jumlah produksi total. Jumlah produksi total tersebut dikonversi dalam nilai total rupiah dan dibagi dengan jumlah pendapatan. Dalam penelitian ini, mengingat variabel pertumbuhan penduduk yang sedikit, maka digunakan pendekatan neraca sumberdaya ekonomi lahan.

B. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat dalam pendekatan Adisasmita (2006) terkait dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi perdesaan harus diikuti oleh pemerataan pendapatan di masyarakat. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan terdistribusi secara merata, 40 persen populasi terbawah akan menerima 40 persen pendapatan, dan 20 persen populasi teratas menerima 40 persen total pendapatan. Dalam penelitian ini, aspek pendapatan dilihat berdasarkan distribusi pendapatan pada masing-masing kelompok penduduk yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur karena infrastruktur yang dibangun merupakan infrastruktur dengan pelayanan tersier sehingga diduga tidak memberikan dampak secara menyeluruh terhadap kawasan desa.

C. Diversifikasi Ekonomi

Diversifikasi ekonomi atau perubahan struktur perekonomian daerah perdesaan dilihat berdasarkan perubahan struktur ekonomi perdesaan. Dalam beberapa dekade terakhir, perluasan kawasan perkotaan dan pembukaan akses kawasan perdesaan mengubah struktur ekonomi kawasan perdesaan tidak lagi berat pada sektor pertanian. Hal tersebut tampak

pada kawasan-kawasan perdesaan yang mempunyai ciri perkotaan, atau biasa disebut sebagai desa kota. Dalam penelitian ini, diversifikasi ekonomi ditilik berdasarkan perubahan struktur mata pencaharian penduduk desa.

2.4.1. Pendapatan Perkapita dan Neraca Sumberdaya Ekonomi Lahan

Neraca sumberdaya lahan merupakan model penghitungan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan oleh masing-masing lahan. Pendapatan perkapita yang mengkonversi jumlah pendapatan total terhadap jumlah penduduk disesuaikan dengan kondisi wilayah penelitian dan variabel infrastruktur, sehingga digunakan model penghitungan neraca ekonomi sumberdaya lahan. Model neraca ekonomi sumberdaya lahan mampu menunjukkan nilai ekonomi masing-masing blok lahan, sehingga dapat dilihat keterkaitannya terhadap pembangunan infrastruktur.

Menurut Suhardjo (2008), sumberdaya lahan merupakan modal utama pembangunan daerah. Pemanfaatan sumberdaya lahan dilaksanakan dengan menyesuaikan aspek ekonomi dan kelestarian secara berimbang. Berdasarkan perhitungan neraca sumber daya lahan, dapat dilihat nilai ekonomi suatu lahan dengan pada periode waktu tertentu. Nilai ekonomi suatu lahan dipengaruhi oleh nilai manfaat yang melekat pada lahan tersebut yang diciptakan oleh akses, sumber daya yang dimiliki, serta aspek lain seperti lokasi.

Pembangunan infrastruktur dan masuknya teknologi dapat berdampak pada bertambahnya nilai guna lahan. Pembangunan irigasi pada kawasan perdesaan yang berbasis pada sektor pertanian menyebabkan naiknya kemampuan produksi baik produktivitas maupun frekuensi produksi. Berdasarkan penghitungan neraca ekonomi lahan sawah, nilai ekonomi lahan sawah berbanding lurus terhadap luas lahan, produktivitas, frekuensi, serta harga satuan. Dengan membandingkan terhadap program pembangunan infrastruktur di perdesaan, dapat dilihat apakah infrastruktur yang dibangun memberikan tambahan nilai manfaat, yang dalam hal ini adalah meningkatkan nilai ekonomi suatu lahan.

Adapun pada penelitian ini, penghitungan nilai ekonomi sumberdaya lahan didasarkan pada penghitungan menggunakan model perhitungan nilai ekonomi sumberdaya lahan yang dikembangkan oleh Suhardjo (2008). Dalam melakukan analisa, dibutuhkan banyak data berdasarkan jenis lahan yang dihitung. Adapun kebutuhan data tersebut bersumber dari data-data sekunder di instansi dan lembaga terkait, maupun data-data dari artikel dan

surat kabar. Adapun kebutuhan data dan model penghitungan nilai ekonomi sumberdaya lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1
Perhitungan Nilai Ekonomi Sumberdaya Lahan

No	Kategori Sumberdaya Lahan	Dasar Penentuan Nilai Ekonomi (Variabel)	Model Perhitungan	Keterangan
1	Sawah	nilai ekonomi lahan sawah, luas lahan sawah, produktivitas, harga satuan, frekuensi panen	$V_s = L_s * Q_s * P_s * N_s$	V_s = nilai ekonomi lahan sawah L_s = luas lahan sawah (ha) Q_s = produktivitas (kw/ha) P_s = harga satuan (Rp/kw) N_s = frekuensi panen/th
2	Pertanian Lahan Kering	nilai ekonomi lahan pertanian kering, luas lahan kering, produktivitas, harga satuan, frekuensi panen / tahun	$V_k = L_k * Q_k * P_k * N_k$	V_k = nilai ekonomi lahan pertanian kering L_k = luas lahan kering (ha) Q_k = produktivitas (kw/ha) P_k = harga satuan (Rp/kw) N_k = panen / th
3	Kehutanan	nilai ekonomi lahan kehutanan, Luas lahan hutan, produktivitas, harga satuan	$V_h = L_h * Q_h * P_h$	V_h = nilai ekonomi lahan kehutanan L_h = luas lahan hutan (ha) Q_h = produktivitas (m ³ /th) P_h = harga satuan (Rp/m ³)
4	Permukiman	nilai ekonomi lahan permukiman, jumlah rumah, luas lahan permukiman, dan harga rata-rata sewa rumah (Rp/th)	$V_l = \sum r * L_r * P_r$	V_l = nilai ekonomi lahan permukiman $\sum r$ = jumlah rumah L_r = luas lahan permukiman (ha) P_r = harga rata-rata sewa rumah (Rp/th)

Sumber: Suhardjo (2008)

Model penghitungan neraca sumberdaya ekonomi lahan pada Tabel 2.1 tersebut dihitung berdasarkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing lahan dalam satu tahun. Artinya, masing-masing lahan dapat memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tergantung nilai komoditas, kemampuan berproduksi, dan luasan lahan tersebut dalam satu tahun.

2.4.2. Diversifikasi Ekonomi Kawasan Perdesaan

Menurut Suhardjo (2008), struktur ekonomi perdesaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berubah dalam tiga dasawarsa terakhir, terutama apabila dilihat dari sisi pendapatan dan kesempatan kerja. Di DIY, investasi infrastruktur perdesaan telah mendorong mobilisasi penduduk perdesaan untuk memperoleh kesempatan kerja di desa-desa lain atau kota-kota lain dalam jarak jangkauannya untuk berkomutasi. Akibatnya, pendapatan dari sektor non pertanian justru lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian.

Suhardjo mengemukakan bahwa diversifikasi perdesaan di DIY memunculkan interpretasi baru terhadap kawasan perdesaan sebagai berikut:

1. Diversifikasi perdesaan dipandang sebagai awal terjadinya marginalisasi ekonomi. Dalam pandangan ini, diversifikasi perdesaan dianggap terjadi akibat tenaga kerja terlempar keluar dari sektor pertanian tanpa ada faktor penarik dari pertanian. Di DIY, dengan karakteristik pertanian kecil, pekerjaan non pertanian diambil dalam rangka memenuhi keanekaragaman pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan subsisten.
2. Diversifikasi perdesaan di Jawa dianggap sebagai akumulasi kapital. Pandangan ini dinilai merupakan pandangan yang lebih optimis, dimana proses akumulasi kapital merupakan pijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut (Svensson, 1991).

Davis (2003) menyebutkan ada enam faktor yang menentukan partisipasi dan pendapatan rumah tangga non pertanian, yaitu :

1. Pendidikan dan ketrampilan,
2. Modal sosial,
3. Etnitas dan kasta,
4. Dinamika gender,

5. Modal finansial, serta
6. Infrastruktur fisik dan informasi.

Sedangkan menurut Suhardjo, penelitian oleh Poaposangkron yang dilakukan di Thailand, menunjukkan bahwa pertumbuhan pekerjaan di sektor non pertanian juga dipengaruhi oleh pertumbuhan di sektor pertanian. Pertumbuhan sektor pertanian yang positif menunjukkan korelasi dengan berkembangnya sektor non pertanian yang produktif. Sebaliknya, apabila pertumbuhan sektor pertanian negatif, maka petani miskin memasuki sektor non pertanian dengan produktivitas yang rendah.

Dalam pendekatan yang sederhana, diversifikasi ekonomi perdesaan ini dapat dilihat dari sisi perubahan mata pencaharian masyarakat. Perubahan mata pencaharian masyarakat memberikan gambaran respon masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian setempat. Berkembangnya sektor industri rumah tangga misalnya mengubah proporsi mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi buruh atau pedagang. Dari pandangan struktur ekonomi, terjadi perubahan struktur dimana sektor pertanian mulai ditinggalkan.

2.5. Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi

2.5.1. Kebutuhan Akses Di Perdesaan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Suwardjo (2008) menggambarkan bahwa keterbatasan akses merupakan salah satu dari karakteristik kemiskinan. Keterbatasan aksesibilitas merupakan bagian dari lingkaran kemiskinan yang digambarkan Malassis (1975) dalam Bahrum (1995). Rendahnya nilai manfaat menyebabkan rendahnya investasi fisik dan material serta investasi modal yang berlanjut terhadap tidak tumbuhnya sektor perekonomian yang menyebabkan kemiskinan. Dan peningkatan aksesibilitas merupakan salah satu cara untuk memotong siklus tersebut.

Peningkatan aksesibilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan mobilitas atau mendekatkan fasilitas yang dibutuhkan kepada masyarakat (proksimitas). Menurut Suwardjo (2008), pendekatan peningkatan aksesibilitas untuk kawasan perdesaan khususnya dapat dilakukan melalui intervensi transportasi berupa pembangunan dan peningkatan jaringan jalan desa, peningkatan pelayanan umum, maupun pembangunan atau relokasi infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan. Jangkauan terhadap fasilitas

umum dianggap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian kawasan perdesaan.

Akses terhadap kawasan pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, koperasi, bank, psasr, telekomunikasi dan informasi, dan berbagai fasilitas lainnya dapat meningkatkan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan sumber daya manusia, serta meminimalisir unsur-unsur kerentanan yang mungkin dihadapi akibat perangkap kemiskinan. Oleh karenanya, aksesibilitas dianggap menjadi salah satu faktor penting untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang ada. Peningkatan aksesibilitas dapat mendukung 4 pilar strategi penanggulangan kemiskinan yang umumnya terjadi di kawasan perdesaan yaitu :

1. Perluasan kesempatan,
2. Pemberdayaan masyarakat miskin,
3. Peningkatan kemampuan (*human capital*), dan
4. Perlindungan sosial (Suhardjo, 2008).

2.5.2. Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi

Infrastruktur dalam berbagai pendekatannya dapat menjadi pendorong perkembangan wilayah baik secara ekonomi maupun spasial, maupun membatasi perkembangan suatu wilayah. Secara ekonomi, peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Aschauer pada tahun 1989 dan Munnell pada tahun 1990 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi, adalah sebesar 60% Dikun (2003).

Namun pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengaruh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah terhadap perkembangan ekonomi dianggap sebagai salah satu fenomena penting dalam perekonomian. Kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadi peningkatan *output* melalui interaksi dengan sektor swasta. Lin (1994) menjelaskan bahwa tingkat perkembangan yang tinggi dapat dicapai melalui pengeluaran pemerintah pada tingkat yang tinggi pula. Sehingga perkembangan ekonomi menjadi

berlipat dibandingkan pengaruh yang diberikan dari pembangunan infrastruktur oleh masyarakat (swadaya) atau sektor privat (swasta).

Namun Barro (1990) juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pengaruhnya tergantung jenis investasinya. Pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan nilai-nilai produksi dan investasi yang menumbuhkan *multiplier effect* mempunyai pengaruh yang positif. Namun disisi lain, terdapat bentuk investasi yang justru menghambat dari proses perkembangan ekonomi yang telah ada. Infrastruktur selain dianggap sebagai katalis, juga berperan sebagai penghambat. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor penghambat dilakukan dalam rangka membatasi pertumbuhan suatu wilayah dengan membangun infrastruktur sebagai batas yang imajiner seperti halnya jalan lingkar yang banyak dibangun di berbagai kota.

Bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap proses produksi misalnya adalah pembangunan jaringan irigasi pada kawasan perdesaan pertanian. Keberadaan irigasi dapat meningkatkan produksi pertanian yang secara langsung memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi kawasan. Dampak lainnya adalah naiknya nilai aset akibat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu lahan yang diukur sebagai penambahan nilai aset.

Selain itu, infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas juga dinilai sebagai nilai tambah ekonomi. Peningkatan nilai akses menyebabkan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Dalam studi investasi sumber daya manusia, Schultz (1961) menuturkan peningkatan sumber daya manusia menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan untuk terciptanya peningkatan kesejahteraan. Kesehatan dan pendidikan bukan merupakan sekedar input fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental (Sjafii, 2009).

2.6. Model Analisa Korelasi Spearman

Analisa korelasi merupakan metode analisa untuk melihat hubungan antar dua atau lebih variabel. Analisa korelasi digunakan untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan antar variabel, tingkat keeratan hubungan, serta signifikansi hubungan. Adapun ada tidaknya hubungan serta tingkat keeratan hubungan tersebut diperoleh berdasarkan angka korelasi yang didapatkan (Muhidin dan Abdurrahman, 2007).

Metode analisa spearman merupakan salah satu metode analisa korelasi bifariat untuk melihat keterkaitan hubungan antar dua variabel. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua buah variabel yang memiliki tingkat pengukuran ordinal. Adapun metode Spearman tersebut dihitung menggunakan rumus berikut :

$$r = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)} \dots\dots\dots 2.1$$

dimana :

- = Koefisien korelasi rank spearman
- n = banyaknya ukuran sampel
- $\sum d_i^2$ = jumlah kuadrat dari selisih *rank* variabel x dengan *rank* variabel y

Namun apabila terdapat lebih dari 20 persen nilai skor pada salah satu variabel adalah sama, maka rumus yang digunakan dalam menghitung koefisien korelasi spearman (Ruseffendi, 1998) adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum d^2}{2 (\sum X^2 \sum Y^2)^{1/2}} \dots\dots\dots 2.2$$

dimana

- $\sum X^2 = (n(n-1))/2 - \sum ((t(t-1))/2)$
- $\sum Y^2 = (n(n-1))/2 - \sum ((t(t-1))/2)$
- $\sum d^2$ = kuadrat jumlah selisih dari rank variabel x dengan rank variabel y
- t = banyak anggota kembar
- n = banyaknya ukuran sampel

Adapun yang dimaksud dengan skor kembar tersebut nilai yang sama dalam kelompok variabel yang sama. Misalnya dalam variabel x yang menggambarkan tingkat pendapatan, hasil pengujian sampel yang memiliki nilai “1” jumlahnya terdapat lebih dari 20 persen dari total jumlah sampel, maka menggunakan rumus tersebut.

Mengingat model analisis ini hanya dapat mengolah data ordinal, maka dilakukan perubahan data menjadi data ordinal. Perubahan data ordinal ini dilakukan dengan membuat interval kelas berdasarkan nilai minimum dan maksimum data. Jumlah interval ditentukan menggunakan rumus Sturges, yaitu menghitung jumlah kelas menggunakan rumus $1+3,3\text{Log } n$, dimana n merupakan jumlah sampel.